

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Isu-isu kerusakan lingkungan saat ini bukan lagi hanya merupakan isu lokal daerah, akan tetapi sudah menjadi isu global, dimana negara-negara di dunia berkomitmen secara bersama-sama ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang merupakan kesepakatan dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992, belum seutuhnya dilaksanakan sehingga kerusakan lingkungan masih terus berlanjut bahkan intensitasnya lebih tinggi. Komitmen bangsa Indonesia untuk menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah karena termasuk dalam lingkup pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, sebagai salah satu lembaga teknis daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomot 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima, maka ditetapkan kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima yang melaksanakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian Pelayanan Umum, Pembinaan di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kota Bima.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Eselon II yang menangani lingkungan hidup Pemerintah Kota Bima diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan sebagai instruksi dari Gubernur .

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, yang disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Periode Tahun 2019 – 2023. Dokumen LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Maksud dan tujuan disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah:

A. Maksud

1. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan pembangunan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, telah dilaksanakan secara transparan dan *akuntable*

berpedoman pada tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahunan yang dilaksanakan telah sesuai visi, misi, tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. Tujuan

Dokumen LKIP 2019 disusun dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dan atau acuan penyempurnaan kebijakan dan strategi pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*) dan tetap mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun 2019.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok , dan Fungsi

1.4.1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mempunyai struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan WaliKota Bima Nomor 14 Tahun 2009 adalah Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.

c. Bidang Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

1. Seksi Sarana Persampahan;
2. Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3;
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan;
3. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

- f. Bidang Pertamanan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh seorang kepalabidang dan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
 - 2. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - 3. Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.

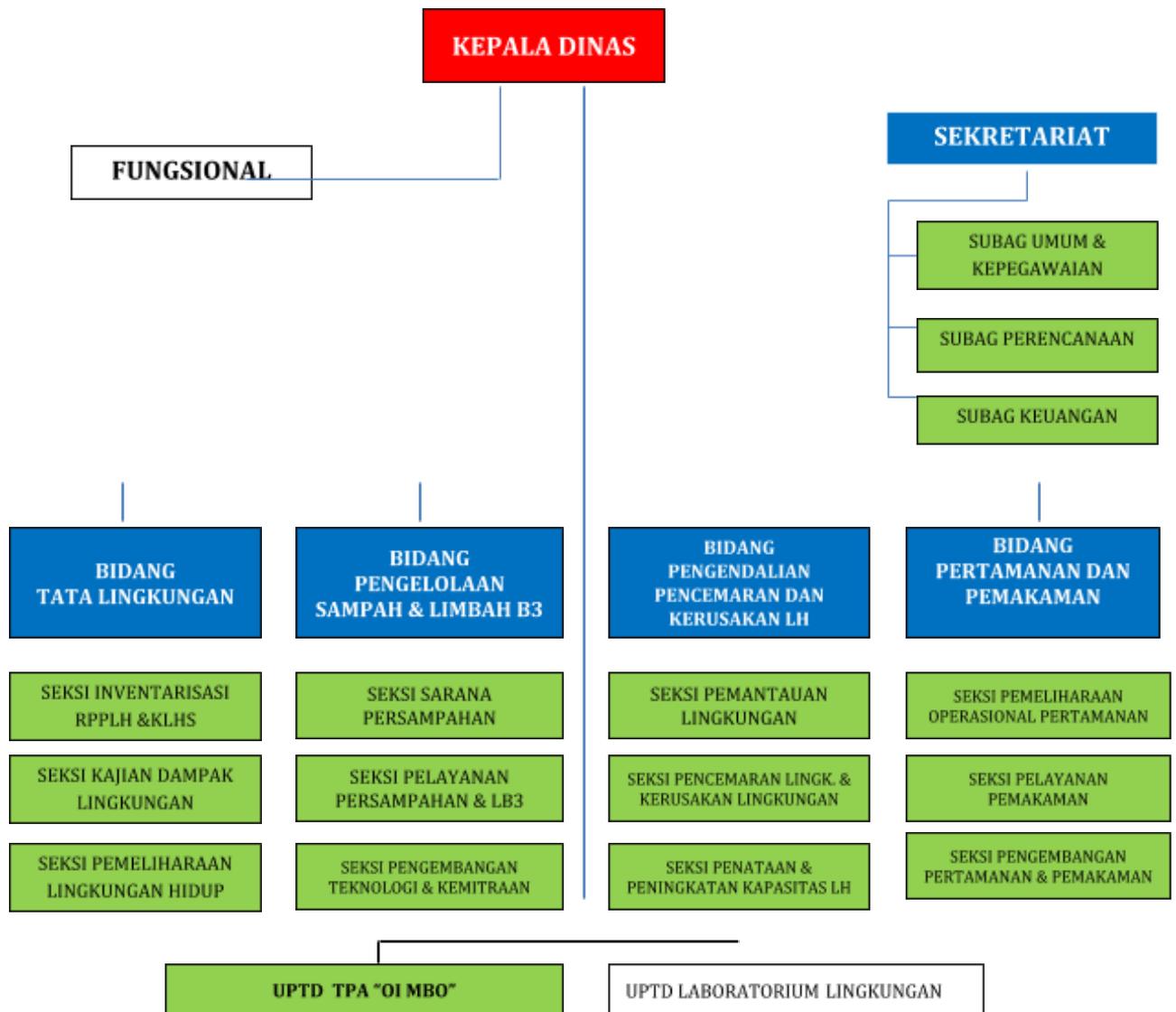
Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan dan Pejabat Pengawas Lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima



Kepala Dinas Melaksanakan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Sumber Daya SKPD

1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima memiliki 143 orang pegawai (PNS) dengan rincian 133 orang pegawai laki-laki dan 10 orang

pegawai perempuan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (Golongan IV/c) dan terendah Juru Muda Tk. I (Golongan I/b), dan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai DLH Kota Bima berpendidikan terakhir tertinggi S2 dan terendah SD/Paket A.

Tabel 1.1.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO	KEPANGKATAN GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
1.	Pembina Utama Muda – IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I – I V/b	1 Orang
3.	Pembina – IV/a	6 Orang
4.	Penata Tingkat I – III/d	16 Orang
5.	Penata – III/c	5 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I – III/b	10 Orang
7.	Penata Muda – III/a	8 Orang
8.	Pengatur Tingkat I – II/d	24 Orang
9.	Pengatur – II/c	17 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I – II/b	13 Orang
11.	Pengatur Muda – II/a	13 Orang
12.	Juru Tingkat I – I/d	19 Orang
13.	Juru – I/c	6 Orang
14.	Juru Muda Tingkat I – I/b	4 Orang
	Jumlah	143 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	5 Orang
2.	Pendidikan Sarjana (S-1)	40 Orang
3.	Pendidikan Sarjana Muda (D-3)	1 Orang
4.	Pendidikan SLTA/Paket C	56 Orang
5.	Pendidikan SLTP/Paket B	21 Orang
6.	Pendidikan SD/Paket A	20 Orang
	Jumlah	143 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S-1 sampai S-2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural (eceloning) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Kondisi Pegawai DLH Kota Bima

Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN STRUKTURAL	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		IV	II I	II	I	N o n G o l o n g	S D	S M P	S M A	D - 3	S 1	S 2	
1.	Ecelon II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Ecelon III	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
3.	Ecelon IV	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5	3
4.	Staf	0	23	67	29	0	20	21	56	1	2 1	0	0
5.	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	7	40	67	29	0	20	21	56	1	4 0	5	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri, untuk sementara masih menempati Gedung Workshop Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terletak di Jalan Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

b. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur yang di miliki DLH Kota Bima belum cukup memadai untuk menunjang pelayanan dan operasional, DLH Kota Bima masih membutuhkan tambahan meubeleur seperti kursi dan meja kerja, lemari arsip dan lemari untuk menyimpan barang aset

lainnya yang masih dipergunakan. Jumlah komputer sebanyak 3 unit, jumlah laptop sebanyak 10 unit (2 Unit rusak berat dan 8 unit dalam kondisi masih bisa dipergunakan dengan baik), jumlah LCD sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, dan jumlah AC sebanyak 5 unit dalam kondisi baik.

c. Kendaraan

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki 34 unit kendaraan roda enam yang terdiri dari 24 unit dump truck, 5 unit ambroll, 3 unit mobil tangki air, 1 unit mobil kompaktor (rusak berat) dan 1 unit mobil sedot lumpur (rusak berat). Kemudian terdapat 8 Unit kendaraan roda 4 yang terdiri dari 1 unit mini bus, 1 unit mobil Laboratorium dan 6 unit pick up (1 unit dalam kondisi rusak berat). Selanjutnya terdapat 20 unit motor 3 Roda serta 9 unit kendaraan roda dua (sepeda motor). Dan juga terdapat 3 unit alat berat berupa 2 unit excavator dan 1 unit mini loader. Jenis dan jumlah kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tersaji dalam table tersebut di bawah ini :

Tabel. 1.4.
Tabel Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019

N O	JENIS SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KET
A	Kendaraan Operasional		
1	Dump Truk	24 Unit	1 Pinjam Pakai ke UPT Pasar
2	Ambrol Truck	5 Unit	
3	Mobil Tanki Air	3 Unit	
4	Mobil Pick Up	4 Unit	1 Rusak
5	Mobil Penyedot Lumpur	1 Unit	Rusak

6	Mobil Compactor	1 Unit	Rusak
7	Mobil Laboratorium	1 Unit	
8	Excavator	2 Unit	
9	Mini Lodge	1 Unit	
10	Sedan Minibus	1 Unit	
11	Motor Roda 3	20 Unit	
12	Motor Roda 2	9 Unit	
B	Peralatan		
1	Mesin Pemotong Rumput Gendong	12 Unit	
2	Mesin Pemotong Rumput Dorong	3 Unit	
3	Gergaji Mesin	1 Unit	Rusak
4	Container	42 Buah	4 Rusak Berat

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima masih membutuhkan jumlah kendaraan yang cukup dan layak jalan untuk melakukan kegiatan operasional lainnya seperti untuk pengangkutan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi ke kecamatan/kelurahan, pengawasan lingkungan maupun pembinaan ke kecamatan/kelurahan.

1.5. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Secara administrasi, Kota Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"- 118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"- 8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132, 58 mm dengan Hari hujan rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21° C sampai 38°C. Hal ini menyebabkan Kota Bima

ditetapkan kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014.

Karena luasan Kota Bima terbatas akan berakibat menahan pertumbuhan tidak berimbang dan penggunaan lahan yang tidak beraturan. Wilayah timur relatif belum berimbang dengan wilayah barat, karena penduduk umumnya masih di pusat kota. Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bima semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau. Suhu udara umumnya meningkat dan kualitasnya menurun.

Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air menurun/sedikit. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman. Pertumbuhan permukiman dan menurunnya luasan daerah terbuka yang tidak didukung drainase sering menyebabkan banjir atau genangan di berbagai wilayah. Banjir atau genangan ini bahkan terjadi daerah-daerah utama dan merusak berbagai sarana jalan. Sungai yang ada di Kota Bima juga banyak yang tercemar, dengan indikator belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD serta menjadi pembuangan sampah. Permasalahan fisik alam yang penting untuk diperhatikan juga adalah Kota Bima termasuk daerah rawan bencana alam. Dampak regional adalah penurunan kualitas lingkungan regional akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya berdampak pada kondisi Kota Bima seperti kondisi sungai, lahan kritis, air, udara dan tanah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan daerah.

Dari Visi tersebut di atas, dinas lingkungan hidup mengacu pada misi yang ke 4 yaitu Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana. Selanjutnya dari misi tersebut kemudian di elaborasi dalam tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indicator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berikut tujuan, sasaran, indicator dan target kinerja 5 (lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagai berikut

:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Periode (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	86%	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	4,74 (Cemar Ringan)	4,5	4	3,5	3	2
					Indeks Kualitas Udara	78,92	79	79,5	80	82	86
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11,01	11,31	12	12,5	13
					% Luas Kawasan Direhabilitasi	0,4	0,8	2	5	15	25

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komperensif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penyusunan strategi tersebut didasarkan dengan kondisi internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, sedangkan dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan . Tabel berikut di bawah ini merupakan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 2.2

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah sarpras dan SDM pengelolaan sampah - Merangsang pertumbuhan Bank Sampah dalam rangka pengurangan sampah - Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan terhadap industry/usaha yang merusak lingkungan - Peningkatan pengawasan Kualitas Air dan Udara
		Meningkatkan kualitas informasi SDA dan LH	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	<p>Meningkatkan area pemakaman yang tertata</p> <p>Meningkatkan taman yang tertata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan pemakaman umum - Peningkatan fasilitas pendukung di dalam kawasan makam - Efisiensi dan efektivitas pemeliharaan taman - Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara

		Ruang Terbuka Hijau
	Meningkatkan konservasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok masyarakat pelindung mata air - Rehabilitasi lahan kritis - Peningkatan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima pada awal tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja utama dengan anggaran Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 9 (Sembilan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 15.219.546.600,00,- (lima belas miliar dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA
TAHUN 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	4,5
		Indeks Kualitas Udara	79
2	Meningkatnya Kualitas tutupan Vegetasi	Persentase Luas RTH Publik	11,01
		Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi	0,8

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja pada table 2.3 tersebut di atas, maka didukung oleh Program dan Anggaran pada table 2.4 tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4. Program dan Rencana Anggaran tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.114.209.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	135.729.900
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	249.560.000
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	11.038.017.700
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	488.341.000
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	300.150.000
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	228.460.000
8	Pengelolaan areal pemakaman	3.193.765.000
9	Peningkatan sarana dan prasarana pertamanan	1.485.854.000
	JUMLAH	15.219.546.600

Dari gambaran table 2.4 tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima akan melaksanakan 9 (Sembilan) program dengan total anggaran sebesar Rp. 15.219.546.600 (lima belas milyar dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019.

3.1 . Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima

merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Capaian kinerja Organisasi diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2019 dengan mengacu kepada :

1. Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019
2. Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019
3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

B. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dengan mendasarkan pada :

1. Pencapaian Target Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 dan Tahun 2019
2. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut adalah data-data capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana tersebut di atas yang diuraikan secara rinci pada table-tabel tersebut di bawah ini :

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1. Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target dan capaian dari

tujuan dimaksud dijelaskan dalam table tersebut di bawah ini

Tabel 3.1 Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	80	83,84	104,8

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019 berada pada angka 83,84 dari yang ditargetkan 80 atau 104,8%. Nilai ini menunjukkan kategori sangat baik, seperti table 3.2 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.2. Kategori IKLH

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

2. Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019, dijabarkan dengan Sasaran Strategis berupa Meningkatnya Kualitas Air dan Udara dengan 2 (dua) indicator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara

Sasaran strategis selanjutnya adalah Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dengan 2 (dua) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase Luas RTH Publik
2. Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi

Untuk melihat sejauh mana capaian dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator yang disebutkan di atas dapat dilihat pada table 3.3 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	4,5	4,3	104,65
		Indeks Kualitas Udara	79	81,36	102,99
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11,01	100
		% Luas Kawasan Direhabilitasi	0,8	0,5	62,50

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja yang menunjukkan hasil yang cukup baik kecuali terhadap capaian indikator kinerja persentase kawasan direhabilitasi yang ditargetkan sebesar 0,8 % hanya mampu direalisasikan sebesar 0,5 % atau 62,50

%. Capaian ini dipengaruhi oleh kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat pemilik lahan areal penanaman dalam menjaga dan merawat pohon pelindung yang ditanam pada lahannya walaupun sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan dan memberikan insentif untuk pohon yang bias tumbuh kepada masing-masing pemilik lahan.

3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019, didukung oleh 9 (sembilan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat menjalankan 3 (tiga) Program dengan 20 (dua puluh) Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam
daerah

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan/RENSTRA/RKA/DPA/DPPA Satuan

Kerja Perangkat Daerah

4. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan 1 (satu) Program "Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan" dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjalankan 1 (satu) Program "Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup" dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

d. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan menjalankan 2 (dua) Program

dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

II. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2. Pengembangan data dan informasi lingkungan

e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Bidang Pertamanan dan Pemakaman menjalankan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN

1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan
2. Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan

Dari uraian tersebut di atas, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tabel 3.4. tentang pencapaian Program dan Kegiatan berdasarkan pagu

Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Kinerja dan Capaian Kinerja seperti tersebut di bawah ini :

LKIP DLH 2019

Tabel 3.4 Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.494.181.400	7.182.431.380
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	368.566.000	368.539.550
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.944.320.400	5.687.531.630
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.181.295.000	1.126.360.200
II	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.221.000	326.465.000
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	62.806.000	59.050.000
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	135.710.000	135.710.000
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	58.855.000	58.855.000
4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	72.850.000	72.850.000
II I	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	264.750.000	263.360.000
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	178.700.000	178.500.000
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	86.050.000	84.860.000
I V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	204.860.000	203.660.000
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	92.195.000	92.195.000
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	112.665.000	111.465.000

LKIP DLH 2019

V	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	3.650.540.000	3.644.677.458,24
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.542.750.000	3.537.422.358,24
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	107.790.000	107.255.100
V I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	1.613.284.000	1.606.442.958
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	1.380.434.000	1.376.480.150
2	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	232.850.000	229.962.808,08

B. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dengan mendasarkan pada :

Setelah disajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran tersebut di atas, berikut akan disajikan table perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran antara tahun 2018 dengan tahun 2019 seperti pada table 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2018 dan 2019

No	Tujuan	Indikator	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,41	80	83,84	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air
							Indeks Kualitas Udara
						Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik
							% Luas Kawasan Direhabilitasi

Bedasarkan table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan capaian tujuan dari 76,41 pada tahun 2018 menjadi 83,84 pada tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 80. Hal ini disebabkan oleh membaiknya Indeks Kualitas air dan indeks kualitas udara yang menjadi indicator sasarannya. Untuk indeks kualitas air, pada tahun 2018 berada pada indeks 4,74 (cemar ringan) menjadi 4,3 pada tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 4,5. Sedangkan untuk indeks kualitas udara juga mengalami perbaikan kualitas yang pada tahun 2018 sebesar

78,92 menjadi 83,83 dari yang ditargetkan sebesar 80 pada tahun 2019.

Berikut disajikan table hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kota Bima pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.6. Hasil pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Bima (musim kemarau dan musim penghujan)

MUSIM KEMARAU

No	Lokasi Sampel	Nilai
1	Sungai Jatibaru Timur	0,47
2	Sungai Ranggo	1,65
3	Sungai Melayu	5,57
4	Sungai Lampe	1,56
5	Sungai Rabadompu	0,82
6	Sungai Raba Salo	0,57
7	Sungai Sadia	2,00
8	Sungai Bedi	2,32
9	Sungai Padolo	1,31
		1,81

MUSIM HUJAN

No	Lokasi Sampel	Nilai
1	Sungai Jatibaru Timur	3,99
2	Sungai Ranggo	4,15
3	Sungai Melayu	4,50
4	Sungai Lampe	3,87
5	Sungai Rabadompu	3,80
6	Sungai Raba Salo	3,40
7	Sungai Sadia	3,70
8	Sungai Bedi	3,71
9	Sungai Padolo	4,04
		3,91

Tabel 3.7 Data hasil pengujian kualitas udara

No.	Kota	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂ (µg/Nm ³)			Rerata Kab/Kota/Provinsi	
			Periode		Rat a-R ata	Periode		Rat a-R ata	SO ₂	NO ₂
			I	II		I	II			
1	Kota Bima	Transportasi	7,91	7,61	7,76	13,1	17,7	15,4	11,73	14,90
		Industri	16,02	17,28	16,65	12,06	14,8	13,43		
		Pemukiman	11,68	10,68	11,18	13,7	18,6	16,15		
		Perniagaan/Perdagangan	11,95	10,71	11,33	14,2	15	14,6		
										11,73

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan **troposfir** yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Di Kota Bima belum terdapat stasiun pemantauan udara ambien yang mengukur kualitas udara secara kualitatif, namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam upaya analisa dan pendataan kualitas udara melakukan kerjasama dengan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Secara umum kualitas udara Kota Bima sampai saat ini masih relatif bagus dan alami dengan kata lain masih dibawah standar baku mutu serta belum terganggu oleh polusi yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada industri-industri besar yang menghasilkan emisi dan gas buang yang menjadi sumber polutan. Selama ini emisi terbesar hanya didominasi oleh industri rumah tangga dan perusahaan BUMN, seperti Pertamina dan PLN. Disisi lain pengujian dan tes emisi kendaraan bermotor belum dilakukan

mengingat belum adanya perda yang mengatur serta peralatan yang memadai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Pasive Sampler dengan menempatkan alat pemantau pada 4 (empat) titik perwakilan yaitu, pada daerah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan 2 (dua) kali sampling yaitu bulan Juni dan bulan Agustus. Saat ini data pengambilan sampling menggunakan titik sampling dan pemantauan kualitas udara ambien, sementara untuk data emisi gas buang belum dilakukan. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konsisten, komponen yang konsentrasinya selalu bervariasi adalah air dalam bentuk uap H_2O dan CO_2 jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

Sumber emisi tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat, antara lain cerobong dari industri atau kegiatan usaha lainnya. Sedangkan sumber emisi bergerak adalah sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat, antara lain gas yang keluar dari kendaraan bermotor. Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara yang tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemaran. Berdasarkan pengukuran langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan BLKPK Propinsi Nusa Tenggara Barat bahwa parameter kebisingan dan debu yang diambil di terminal darat Kota Bima menunjukkan 67,7 dB, dan $3,16 \mu g/Nm^3$.

Indikator lainnya yang menjadi indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berada pada angka yang constant antara tahun 2018, target 2019 dan capaian 2019 yaitu sebesar 11,01. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan luasan RTH atau dengan kata lain tidak ada kegiatan pembangunan taman baru.

Persentase 11,01 dimaksud merupakan nilai luasan RTH publik di Kota Bima berupa taman, pemakaman, lapangan terbuka dan hutan kota dengan total luasan sebesar 167,10 Ha dibagi dengan luasan kawasan terbangun di Kota Bima seluas 1.517,06 Ha.

Berikut disajikan table tentang luasan RTH Publik di Kota Bima berdasarkan jenis dan luasannya sebagai berikut :

Tabel 3.8. Rekap Luas RTH di Kota Bima Tahun 2019

No	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1	Taman	13,47	
2	Lapangan Terbuka	18,85	
3	Kuburan	27,23	
4	Hutan Kota	109	
TOTAL		168,55	

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bima Tahun 2019

Berdasarkan table tersebut di atas, maka didapatkan luas RTH sebesar 629.978 Ha. Dari luasan ini maka dapat dihitung persentase luasan RTh yang dihitung dari luas RTH dibagikan dengan luas kawasan terbangun dikalikan dengan 100. Diketahui bahwa luas

kawasan terbangun adalah sebesar 1.517 Ha

Indikator ke empat dari sasaran Dinas lingkungan Hidup Kota Bima adalah persentase luas kawasan direhabilitasi dari capaian tahun 2018 sebesar 0,4% menjadi 0,5% pada tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 0,8%. Penentuan target capaian tahun 2019 ini berdasarkan luasan lahan yang direhabilitasi pada tahun 2019 yaitu seluas 5 (lima) Ha dari total luasan lahan kritis di Kota Bima sebesar 1.248 Ha. Dari luasan lahan yang dikonservasi yang dilakukan dengan penanaman pohon dimaksud berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima hanya terlihat tumbuh dengan baik seluas kurang lebih 2 Ha, atau 0,1% dari total luas lahan kritis di Kota Bima.

1. Pencapaian Target Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut akan disajikan perbandingan pencapaian target program dan kegiatan antara capaian program dan kegiatan dengan target kinerja dan capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019 seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 3.9 Pencapaian target program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2018 dan tahun 2019

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		
			REALIS ASI 2018	TARGET 2019	REALIS ASI 2019
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE SAMPAH YANG TERANGKUT	52%	57%	57%
		PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH	3%	7%	5%

1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Volume sampah yang terangkut	120 M ³	179,33 M ³	179,33 M ³
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi	19 Unit Dump Truck, 5 Unit Ambroll, 2 Unit Excavator dan 1 Mini Lodge	24 Unit Dump Truck, 5 Unit Abroll, 2 Unit Pick Up, 2 Unit Excavator dan 1 Unit Mini Lodge	24 Unit Dump Truck, 5 Unit Abroll, 2 Unit Pick Up, 2 Unit Excavator dan 1 Unit Mini Lodge
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok Bank sampah yang dibina	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk
II					
I I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS AIR	78%	100%	101,28 %
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Akumulasi nilai indikator yang dinilai	71	71	71
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	15	25	20
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	panjang sungai dan pantai yang ditangani	250	250	170
4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah pelanggaran lingkungan yang ditangani	7 Kasus	10 Kasus	3 Kasus
III					
I I I	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	MENINGKATNYA LUAS LAHAN YANG DIKONSERVASI	100%	100%	20%
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	Luas lahan yang dikonservasi	5 Ha	5 Ha	1 Ha
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Kelompok perlindungan mata air	5 Klp	5 Klpk	5 Klpk
IV					
I V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN LH		TDK ADA DATA	
1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Nilai Kinerja Pengelolaan LH	Baik	Baik	Baik

V	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	PERSENTASE AREA PEMAKAMAN YANG TERTATA	20%	35%	31,61 %
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Panjang pagar kuburan	1.356 Meter	1.500 Meter	1.949 Meter
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman dalam kondisi baik	15	15 Makam	10 Makam
V I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	PERSENTASE TAMAN KOTA YANG TERTANGANI	65%	70,97 %	70,97 %
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	Jumlah taman yang dipelihara dengan baik	20 Taman	44 Taman	44 Taman
2	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	Luas taman yang dibangun	0	0,3 Ha	0,01 Ha

2. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut tersaji table tentang realisasi anggaran tahun 2019 dan 2018 pada masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 dan 2019

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.357.894.670	7.494.181.400	7.182.431.380
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	499.733.023	368.566.000	368.539.550
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2.998.721.247	5.944.320.400	5.687.531.630
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	859.440.400	1.181.295.000	1.126.360.200

II	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	532.638.000	330.221.000	326.465.000
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	67.405.000	62.806.000	59.050.000
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	158.115.000	135.710.000	135.710.000
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	50.405.000	0	0
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	55.885.000	58.855.000	58.855.000
4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	138.693.000	72.850.000	72.850.000
5	Koordinasi penyusunan AMDAL	62.135.000	0	0
II I	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	167.970.000	264.750.000	263.360.000
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	138.360.000	178.700.000	178.500.000
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	29.610.000	86.050.000	84.860.000
I V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	163.075.000	204.860.000	203.660.000
1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	163.075.000	112.665.000	111.465.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	3.111.194.000	3.650.540.000	3.644.677.458,24
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.021.226.000	3.542.750.000	3.537.422.358,24
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	89.968.000	107.790.000	107.255.100
V I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	1.287.980.467	1.613.284.000	1.606.442.958
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	1.123.259.467	1.380.434.000	1.376.480.150
2	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	164.721.000	232.850.000	229.962.808,08

3.2. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja tahun berjalan dengan Target Kinerja Sasaran jangka menengah yang direncanakan

Pencapaian indikator kinerja tahun 2019 dengan target kinerja sasaran jangka menengah daerah yang ditetapkan pada RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023. Mengacu kepada misi ke 4 RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana.

Untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja sasaran tahun berjalan (tahun 2019) terhadap target RPJMD pada tahun 2019 sebagaimana table 3.14 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.11

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun berjalan terhadap target RPJMD tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal RPJMD	Target RPJMD	Realisasi Kinerja	Realisasi RPJMD S/d	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	4,74	4,5	4,3	4,3	2
		Indeks Kualitas Udara	78,92	79	81,36	81,36	86
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	11,01	11,01	11,01	11,01	13

		% Kawasan Direhabilitasi	0,4	0,8	0,5	0,5	25
--	--	--------------------------	-----	-----	-----	-----	----

3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dan akan dilakukan

Berdasarkan uraian dan diskripsi terhadap beberapa hal tersebut di atas, maka dapat diuraikan analisis tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja disertai dengan alternative solusi yang telah dan akan dilakukan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indicator Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, ada 3 (tiga) indicator sasaran yang mencapai target dan 2 indikator melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2019, yaitu Indikator sasaran berupa Indeks Kualitas air dengan capaian target sebesar 4,5 dari yang ditargetkan 4,3 atau 104,65%. Hal ini disebabkan oleh adanya intervensi program peningkatan kualitas air (air sungai maupun air laut), Program Permata (Perlindungan Mata Air) dan Konservasi Sumberdaya Alam. Adapaun intervensi program itu berupa :

1. Adanya kegiatan kali bersih dan bersih pantai.
2. Telah dilaksanakannya pencaangan gerakan bersih sungai dan pantai yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.
3. Terbentuknya Komunitas sungai.
4. Terbentuknya kelompok mata air

Selanjutnya untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara dari target 79 dapat dicapai nilai indeks 83,84 atau 106,13%. Hal ini disebabkan

oleh intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan asap (emisi), berkurangnya masyarakat yang membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya.

Berikutnya adalah untuk indikator sasaran persentase luas RTH Publik didapatkan nilai capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada pelaksanaan pembangunan taman pada lahan baru diluar lahan yang sudah ditentukan sebagai RTH sehingga yang dilaksanakan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertamanan hanya dilakukan revitalisasi di dalam RTH yang sudah ada. Sedangkan untuk indikator sasaran persentase luas lahan dikonservasi tidak memenuhi target sebesar 0,8% dan hanya dapat terealisasi sebesar 0,5% atau 62,5%. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya lahan untuk kegiatan konservasi lahan kritis yang ada. Selama ini penanaman dimaksud dilakukan pada lahan-lahan milik masyarakat sehingga ketika pemilik lahan punya kepentingan lain di dalam lahan tersebut juga akan mengganggu keberadaan pohon yang ditanam tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan atas penanaman dan pemeliharaan untuk pohon yang ditanam tersebut, dan ternyata upaya yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari harapan dan ke depan pemerintah daerah harus mampu menguasai lahan yang akan dijadikan target lokasi penanaman dengan sebelumnya melakukan kajian terhadap kelayakan dari lahan tujuan.

Selain dari beberapa factor pendukung dan penghambat tersebut di atas, juga disajikan beberapa permasalahan lainnya berikut solusinya sebagai berikut :

A. Permasalahan :

1. Tidak teralisasinya pengadaan sarana dan prasarana (mobil pengangkut sampah) sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target 60%.
2. Belum beroperasinya bank sampah secara maksimal
3. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4. Belum adanya profil yang menggambarkan secara utuh tentang luas RTH dan kawasan pemukiman.
5. Konsentrasi program dan kegiatan hanya pada revitalisasi taman, makam dan hutan kota yang sudah ada.
6. Adanya tumpang tindih dalam implementasi tugas pokok dan fungsi seperti, pembangunan taman baru dilaksanakan oleh OPD lain.

Solusi yang telah dan akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada
2. Mendukung biaya operasional bank sampah sehingga bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
3. Terwujudnya penyusunan perwali sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pengelolaan Persampahan untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4. Menyusun profil Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan secara detail tentang potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

5. Menyusun Perda tentang Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) berikut turunannya.
6. Menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Penambahan luasan RTH public menjadi minimal 20% dari luas Kawasan terbangun sesuai dengan amanat Perda RTRW Kota Bima.

3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tipe A yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4 (empat) bidang. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah seperti pada table tersebut di bawah ini :

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	104,65	95,97	4,03
		Indeks Kualitas Udara	106,13	99,41	0,59
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	% Luas RTH Publik	100,00	99,76	0,24
		% Luas Kawasan Direhabilitasi	62,50	99,47	0,53

Dari table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada semua sasaran

terlihat adanya efisiensi anggaran, namun pada sasaran meningkatnya kualitas tutupan vegetasi dengan indicator persentase luas Kawasan direhabilitasi walaupun terjadi sedikit efisiensi namun juga capaian targetnya masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk indicator-indikator yang lain capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dengan tetap menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran walaupun tidak terlalu signifikan.

3.5. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian target tujuan dan target sasaran tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, seperti berikut di bawah ini :

A. Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara diwujudkan dengan 2 (dua) indicator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air

Dalam rangka mewujudkan Indeks Kualitas Air yang baik, didukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

a. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan.

Program ini memiliki 2 (dua) indicator yaitu persentase sampah yang tertangani dan persentase pengurangan sampah. Nilai capaian pada tahun 2019 ini adalah sebesar 57% dari yang ditargetkan sebesar 57% atau capaiannya 100%. Nilai ini didapatkan dari rumusan jumlah sampah yang ditangani (angkut dan buang) dibagi dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Berdasarkan data pada neraca sampah bahwa jumlah

timbulan sampah secara keseluruhan di Kota Bima adalah sebesar 314,61 M³ atau 103,82 Ton dengan berat jenis sampah sebesar 0,33. Dari formula perhitungan tersebut di atas, maka didapatkan jumlah sampah yang ditangani adalah sebesar 179,33 M³ atau 59,18 Ton dari total timbulan sampah sebesar 314,61 M³ atau 103,82 Ton atau dengan kata lain persentase sampah yang terangkut adalah sebesar 57 % (neraca sampah terlampir).

Selanjutnya, untuk indicator persentase pengurangan sampah adalah jumlah sampah yang dikurangi dibagi dengan total timbulan sampah dikalikan dengan 100. Pada tahun 2019 untuk pengurangan sampah ditargetkan sebesar 7% namun capaiannya berada pada angka 5% atau sebesar 15,73 M³ atau 5,19 Ton.

Tidak terlepas dari 2 (dua) indicator tersebut di atas, juga didukung oleh 3 (tiga) kegiatan masing-masing tersebut di bawah ini berikut indicator dan capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan indicator volume sampah yang terangkut. Sesuai dengan neraca sampah terlampir di dapatkan volume sampah 59,18 Ton atau 179,33 M³. (data jumlah ritase terlampir).
2. Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan indicator jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi. Pada tahun 2019 ditargetkan 24 unit

dump truck, 5 unit ambroll, 2 unit pick up, 2 unit excavator dan 1 unit mini loader, dan target itu terealisasi pada APBD tahun 2019 dengan pengadaan 5 unit dump truck (2 unit dari DAK dan 3 unit dari DAU) serta pengadaan 2 unit pick up. Dengan demikian realisasi dari target capaian ini adalah sebesar 100%.

3. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan indicator jumlah kelompok bank sampah yang dibina dengan target 5 kelompok bank sampah dan terealisasi 100% atau sebanyak 5 kelompok bank sampah. Data jumlah dan nama bank sampah terlampir.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini memiliki indicator persentase meningkatnya kualitas air dan dapat diukur dengan membandingkan antara kualitas air pada tahun berjalan dibagi dengan kualitas air pada tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100. Pada tahun sebelumnya (2018) kualitas air berada pada angka 78, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 101,28% dari yang ditargetkan 100% atau dengan kata lain bahwa kualitas air pada tahun 2019 adalah diangka 79. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan masing-masing sebagai berikut :

1. Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura

dengan indikator akumulasi nilai indikator dari yang ditargetkan sebesar 71 dan terealisasi sebesar 71 juga atau 100%.

2. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dengan indikator jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi dari target 25 usaha/kegiatan hanya mampu direalisasikan sebanyak 20 usaha/kegiatan atau capaian sebesar 80 %.
3. Kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih dengan indikator Panjang sungai dan pantai yang ditangani, dari target sepanjang 250 meter hanya mampu direalisasikan sepanjang 170 meter atau 68 % dengan lokasi tersebar antara lain bendungan rontu, jembatan Ranggo dan sungaim padolo.
4. Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan indikator jumlah pelanggaran lingkungan yang ditangani dari yang ditargetkan sebanyak 10 kasus dan hanya mampu diselesaikan sebanyak 3 kasus atau sebesar 30%.

2. Indeks Kualitas Udara

Indikator Indeks Kualitas air didukung oleh program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung

oleh kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan dengan indicator nilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Idealnya untuk mengukur kinerja dari program dan kegiatan ini adalah adanya peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sampai tahun 2019 ini Pemerintah Kota Bima belum memiliki perda RPPLH dimaksud, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengukuran atas program dan kegiatan ini.

B. Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan memiliki 2 (dua) indicator yaitu :

1. Indikator Persentase Luas RTH Publik

Dalam rangka mewujudkan capaian dari indicator persentase luas RTH public ini didukung oleh 2 (dua) Program dan 4 (empat) Kegiatan masing-masing sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Area Pemakaman dengan indicator persentase area pemakaman yang tertata dengan formulasi perhitungan jumlah area pemakaman yang tertata dibagi dengan jumlah area pemakaman seluruhnya dan dikalikan dengan 100. Berdasarkan formula tersebut dapat dihitung bahwa pada tahun 2019 terdapat 30 Pemakaman yang ditata dari total jumlah pemakamn sebanyak 92 pemakaman. Dengan demikian didapatkan angka 31,61% dari yang ditargetkan sebesar 35% atau sebesar 90,31%.

Dalam menunjang program pengelolaan areal

pemakaman tersebut di atas, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan indicator Panjang pagar kuburan. Pada tahun 2019 ditargetkan penambahan pagar kuburan sepanjang 1.500 meter namun mampu direalisasikan sepanjang 1.949 meter atau 129,93%. Kegiatan ini dititik beratkan pada pembangunan pagar pemakaman.
 2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman dengan indicator jumlah sarana dan sarana pemakaman dalam sarana baik, dari target kinerja tahun 2019 sebanyak 15 makam hanya mampu terealisasi sebanyak 10 makam. Kegiatan ini dititik beratkan pada penanganan dan pengelolaan fasilitas yang ada dalam pemakaman itu sendiri seperti sarpras pemakaman.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan indicator presentase taman kota yang tertangani dengan formula perhitungan jumlah taman yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh taman dikalikan dengan 100. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 70,97 % dengan realisasi sebesar 70,97 % atau sebanyak 44 taman dari jumlah taman seluruhnya sebanyak 62 taman. Program dimaksud didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana pertamanan dengan indicator jumlah taman yang dipelihara dengan baik dari target 44 taman dan terealisasi sebesar 100 % atau sebanyak 44 taman.

2. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan dengan indicator luas taman yang dibangun. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan luas taman sebesar 0,01 Ha dari target sebesar 0,3 Ha atau 3,33 %.

2. Indikator Persentase Luas Kawasan Direhabilitasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya luasan Kawasan yang direhabilitasi dilaksanakan oleh program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan indicator program persentase meningkatnya luas lahan yang dikonservasi dengan formulasi perhitungan luas lahan yang dikonservasi tahun berjalan dibagi dengan luas lahan yang dikonservasi tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100. Dari hasil perhitungan dimaksud dari target 100 % hanya mampu dilaksanakan sebesar 20 %. Atau 1 Ha dari target 5 Ha. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan indicator luas lahan yang direhabilitasi. Pada tahun 2019 ditargetkan luas lahan yang dikonservasi seluas 5 Ha dan hanya mampu terealisasi 1 Ha atau 20 %.
- b. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan indicator jumlah kelompok perlindungan mata air

deangan target 5 kelompok dan mampu direal;isasikan
100 % atau 5 Kelompok.

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan
OPD

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.212.129.500	1.185.785.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	67.537.000	66.987.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.600.000	36.283.960
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80.200.000	79.222.240
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.760.000	80.760.000
5	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	21.840.000	21.840.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	98.628.500	98.627.500
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.950.000	28.950.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	19.610.000	19.610.000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	101.850.000	92.970.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.360.000	30.360.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	41.950.000	41.923.000
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	538.844.000	538.486.300
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000	49.765.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	191.430.700	191.375.600
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.600.800	63.599.500
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.629.900	96.576.150
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.200.000	31.200.000

LKIP DLH 2019

3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	258.110.000	258.110.0
1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	28.480.000	28.480.00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	28.480.000	28.480.00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RENSTRA/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	120.775.000	120.775.0
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	80.375.000	80.375.00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.494.181.400	7.182.431
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	368.566.000	368.539.5
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.944.320.400	5.687.531
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.181.295.000	1.126.360
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.221.000	326.465.0
1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	62.806.000	59.050.00
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	135.710.000	135.710.0
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	58.855.000	58.855.00
4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	72.850.000	72.850.00
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	264.750.000	263.360.0
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	178.700.000	178.500.0
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	86.050.000	84.860.00
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	204.860.000	203.660.0
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	92.195.000	92.195.00

LKIP DLH 2019

2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	112.665.000	111.465.0
8	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	3.650.540.000	3.644.6
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.542.750.000	3.537.4
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	107.790.000	107.255.1
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	1.613.284.000	1.606.442
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	1.380.434.000	1.376.480
2	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	232.850.000	229.9
TOTAL		15.219.506.600	14.86

BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan yang tuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Bima Tahun 2019.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan standar akuntabilitas yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini disusun secara periodik, guna menyajikan data dan informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholder.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indicator sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran strategis; Meningkatnya Kualitas Air dan Udara;

Pada Sasaran Stategis ini, Dinas Lingkungan hidup Kota Bima, pada indicator indeks kualitas air dari target 4,3 dapat terealisasi sebesar 4,3 (cemar ringan) atau sebesar 104,65 %. Sedangkan untuk indicator indeks kualitas udara dari yang ditargetkan sebesar 79 mampu direalisasikan menjadi 81,36 atau 102,99. Dengan demikian bahwa kinerja meningkatnya kualitas air dan udara berada pada kondisi yang sangat baik.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis; Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi

Pada sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu persentase luas Ruang Terbuka Hijau Publik dengan target kinerja 11,01 % dan dapat dicapai sebesar 11,01 5 atau 100 %. Selanjutnya indikator kedua yaitu persentase luas kawasan direhabilitasi dari yang ditargetkan 0,8 % hanya mampu direalisasikan sebesar 0,5 % atau 62,50 %.

Dengan demikian maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaras dengan program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja (PK), Baik Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program maupun Capaian Kinerja Kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2019 dapat dicapai dengan target yang telah ditentukan. Namun pada beberapa indikator belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Tidak tersedianya lahan untuk penambahan luasan RTH Publik sehingga menyebabkan terjadinya stagnansi dari luasan RTH Publik dimaksud. Dalam RTRW Kota Bima tahun 2011-2031 telah ditetapkan bahwa untuk luasan RTH Publik minimal 20 persen dari total luas kawasan terbangun;
2. Pemerintah Kota Bima tidak memiliki lahan untuk penanaman (konservasi), sehingga konservasi lahan kritis dilakukan pada lahan milik masyarakat sehingga ketika pemilik lahan memiliki kepentingan atas lahan tersebut maka pohon yang telah tertanam akan ikut

terganggu.

Berdasarkan hambatan dan kendala tersebut di atas, bahwa kunci dalam mendukung pencapaian target dimaksud adalah dengan penyediaan lahan yang representative sesuai dengan kebutuhan yang ada.